

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

MEMBANGUN KEMBALI SEBUAH BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Salah satu ciri khas Rama Mangunwijaya adalah kemampuan pandangannya untuk menembus segala omong kosong dan munafik, khususnya mengenai watak khas Indonesia dlsb. Karena itu saya mau menangkap hal budaya dalam tulisan ini (sauduran kembali bagian kedua sebuah makalah suatu simposium di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Desember 1998). Tetapi bukan budaya pada umumnya, melainkan budaya politik. Kita banyak bicara tentang etika politik. Akan tetapi, tanpa budaya politik etika politik tidak akan meyakinkan. Kemanusiaan mulai dengan peradaban. Orang menjadi biasa berlaku secara beradab, secara berbudaya (dan saya tidak akan masuk pertanyaan menarik tentang perbedaan antara berbudaya dan beradab). Itulah yang mencerminkan martabatnya. Dan itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari seperti juga dalam politik.

Karangan ini bertolak dari suatu pengandaian yang menyedihkan: Bahwa dalam puluhan tahun kemunafikan, kebohongan, penindasan dan pamrih telanjang, di bawah suatu permukaan yang berbau Jawa-jawaan -dan yang membuat muak justru banyak orang Jawa: Mereka merasa budaya indah mereka terhina oleh pemanfaatannya selama 30 tahun terakhir, - bangsa Indonesia kehilangan budaya politiknya.

Namun maksud karangan ini sangat terbatas. Saya tidak merasa sanggup untuk menguraikan tema ini secara memadai. Saya membatasi diri pada kritik beberapa unsur-unsur kerusakan budaya politik selama pemerintahan Orde Baru, lalu mengajukan beberapa gagasan yang masih sangat tentatif dan simple tentang bagaimana budaya politik dapat dibangun kembali. Bagi saya juga jelas: Kehidupan politik kita hanya dapat berbudaya sebagai kehidupan politik yang demokratis.

Kita memerlukan sebuah budaya politik yang manusiawi, sopan, terbuka, tidak feodal, urban, pendeknya, sebuah budaya politik yang efektif dan tidak memalukan. Kita mau menjadi bangsa yang beradab dan mewujudkan suatu kehidupan politik yang manusiawi dan beradab, dan untuk itu tidak cukup mengacu pada etika politik. Pergaulan yang beradab mengandaikan sebuah budaya kelakuan. Kehidupan politik beradab mengandaikan sebuah budaya politik. Sama seperti dari orang yang kita kagumi, kita mengharapkan agar dia bukan hanya takwa dan alim, melainkan juga sopan, tahu diri, berpan-

dangan luas, memiliki humor, mampu mengambil jarak, tidak picik-fanatik dalam pandangannya, melainkan tenang, cool, dan tetap positif.

Budaya politik lalu merupakan keseluruhan kebiasaan dalam bersikap, bergaul, berkomunikasi dalam dimensi politik. Suatu suasana yang dalam segala persaingan dan perebutan politik tetap menjamin kelakuan yang tidak memalukan. Katakan saja, inti budaya politik yang menurut hemat saya hendaknya dikembangkan adalah pembawaan dan cara penyelesaian konflik-konflik yang beradab dan dewasa. Budaya politik itu faham yang tidak sedalam etika politik, tetapi barangkali lebih nyata, lebih jujur, lebih efektif. Budaya politik itulah yang dilihat seorang pengamat yang mengobservasikan kehidupan politik, bukan pertama-tama prinsip-prinsip etis yang –katanya- mendasarinya. Nah, kita mengharapkan sebuah budaya politik nasional yang menunjang kepercayaan diri yang sehat, di mana masing-masing pihak tahu diri, dengan kemampuan untuk merelatifkan diri, untuk melihat keseluruhan, ya untuk tetap bergaul sebagai orang yang dewasa dan beradab.

Kualitas budaya politik sebuah negara bukan suatu hal sampingan belaka. Daripadanya tergantung efektifitas sistem konstitusional dan hukum, serta efektifitas komunikasi dalam pengambilan keputusan. Suatu budaya politik yang cacat berarti komunikasi politik dan, dengan demikian, proses pengambilan keputusan politik, cacat juga. Dan tentu saja, masyara-

kat, terutama juga orang-orang dari luar, mengukur kedewasaan dan peradaban berpolitik sebuah negara dari mutu budaya politiknya.

Dari latar belakang ini kelihatan perlunya sebuah budaya demokratis mendukung adanya lembaga-lembaga demokratis. Berikut ini saya akan bertolak dari beberapa defisit dalam budaya politik di negara kita selama Orde Baru yang akan menghasilkan beberapa pokok sebuah budaya politik demokratis.

DEFISIT BUDAYA POLITIK

Setengah tahun yang lalu sistem Orde Baru mendadak menunjukkan kelemahan internalnya. Presiden Soeharto tidak mempunyai pilihan daripada mengundurkan diri. Sistem Orde Baru ambruk (meskipun banyak simpul kepentingannya masih operatif).

Sebenarnya sudah cukup lama sistem kekuasaan Orde Baru menunjukkan tanda-tanda kecapaian. Pesawat terbang Boeing 747 pertama yang mulai terbang sekitar tahun 1970, kebanyakan sekarang sudah diistirahatkan untuk selamanya. Tentu saja, sebuah sistem politik sangat berbeda dari sebuah pesawat terbang. Sistem politik, sebagai sistem sosial, merupakan sistem hidup, dan ciri khas sistem hidup adalah bahwa dia beregenerasi. Jadi sebenarnya tak perlu, malah tak boleh sebuah sistem politik memberikan kesan "aus". Sistem sosial

hanya akan aus kalau kehilangan daya kreatifnya itu (kalau manusia secara individual tetap terbatas kemungkinan regenerasinya sehingga cepat atau lambat ia akan mati; tetapi sistem sosial karena orangnya ganti dan "tulang-belulang"nya" bersifat hukum dan struktur normatif lain tidak ada keterbatasan "alami" itu). Dan hal itu hanya dapat terjadi apabila sistem itu menutup diri (karena ciri khas kenyataan yang kita sebut "hidup" adalah pertukaran zat: hanya dalam pertukaran terus-menerus dengan lingkungan di luarnya dia dapat hidup; organisme yang sudah "mandiri", artinya, tidak mengadakan pertukaran zat dengan lingkungan di luarnya, kita sudah "mati" dan segera terdekomposisi).

Sistem Orde Baru tidak berhasil mempertahankan vitalitas yang ditunjukkannya pada permulaan. Kekuasaan semakin macet dalam pelbagai disfungsi koruptif. Hal itu tidak seluruhnya lepas dari budaya politik yang dikembangkannya. Berikut ini saya mau menunjuk pada **empat defisit** dalam budaya politik yang menurut hemat saya cukup mencolok dan perlu diberi perhatian sungguh-sungguh di masa mendatang oleh semua pecinta bangsa.

(1) Defisit budaya politik kita yang **pertama** dan paling mencolok adalah dalam hal kemungkinan untuk mengajukan pemikiran alternatif secara efektif, dan terutama dalam hal kritik. Sistem kita praktis mengimunitasikan diri terhadap kritik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tersedia

cukup banyak jalur untuk mengajukan kritik: MPR yang dapat mengkritik dan menuntut pertanggungjawaban pimpinan pemerintahan. DPR dalam rangka pembahasan rencana perundangan, tetapi juga masyarakat dengan berdasarkan pasal 28.

Tetapi kritik itu selama Orde Baru tidak dapat disuarakan secara langsung apabila menyangkut kebijakan pimpinan pemerintahan. Pimpinan sendiri tidak pernah dikritik, diminta secara spesifik menjawab pertanyaan tentang pelbagai kebijakan yang telah diambil, tidak pernah dilaksanakan oleh MPR. Mempertanyakan pelbagai keputusan dan ketetapan pemerintah praktis sudah tidak terjadi. Hanya dengan susah payah, dengan berputar-putar, gagasan alternatif dapat diajukan.

Dengan lain kata, sistem Orde Baru tidak tahan kritik dan telah menutup hampir semua salurannya. Hal itu memberikan kesan bahwa wacana politik di negara ini tidak lagi segar, efektif dan to the point. Banyak masalah yang sangat perlu dibicarakan, yang juga dirasakan perlu dibicarakan baik oleh elit politik sendiri, maupun oleh banyak pihak dalam masyarakat, tidak jadi dibicarakan. **Pembelengguan kritik** itu tercermin dalam pendekatan keamanan jauh berlebihan terhadap segala acara wacana di negara kita yang dicurigai menyuarakan kritik.

Berkaitan dengan ini adalah tabuisasi pengertian **oposisi**. Bukan hanya kata oposisi yang ditabukan, melainkan sikap

yang mengkritik dan menuntut (daripada memohonkan perhatian atas) kebijakan lain tidak dimungkinkan lagi. Padahal oposisi, entah disebut oposisi atau tidak, justru merupakan tanda kemandirian sistem kekuasaan karena mengandaikan adanya konsensus dasar yang kokoh. Sedangkan kalau pemikiran dan wacana "oposisional" langsung dianggap memusuhi sistem, sistem sendiri menggeser seluruh gagasan alternatif ke luar dari wacana yang mungkin dan memasukkan pihak-pihak ke dalam wilayah "luar sistem" yang sebenarnya tidak memusuhi sistem melainkan hanya mempertanyakan kebijakan-kebijakan tertentu di dalamnya.

Dalam defisit kritik termuat juga kelumpuhan semakin menyeluruh lembaga-lembaga kontrol eksekutif yang sebenarnya ada. Padahal fungsi kontrol adalah vital bagi setiap sistem. Jumlah kebijakan dan keputusan yang di luar segala kemungkinan kontrol yang nyata semakin besar dan hal itu, dilihat dari sudut teori tentang sistem-sistem yang mengemudikan diri sendiri (self-regulating systems) cukup mengkhawatirkan. Seperti halnya Chernobyl di tahun 1986, begitu sistem Orde Baru mendatang mengalami sebuah burn-out.

(2) Defisit budaya politik Orde Baru kedua adalah inflasi omongan tentang nilai-nilai bangsa dsb. Nilai-nilai yang memang sangat sentral, baik secara formal seperti Pancasila, maupun secara non-formal seperti kekeluargaan, kesopanan, Ketimuran, kepentingan nasional, dipakai terus menerus teta-

pi hampir selalu untuk membenarkan kebijakan eksekutif. Atau, lebih tepat, untuk menangkis segala kritik, bahkan pertanyaan kritis. Padahal sebenarnya nilai-nilai itu dalam pandangan masyarakat dipergunakan untuk membenarkan kepentingan pribadi pejabat dan bagian elit politik yang sedang berkuasa.

Dengan demikian kita juga dapat bicara tentang penyalahgunaan nilai-nilai bangsa. Kata "pancasilais" lalu tidak lagi berarti menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan dan peradaban, kepentingan dan persatuan bangsa bersama, kerakyatan, dan keadilan bagi semua, melainkan tidak mempersoalkan batas wewenang penguasa". Dan yang "anti-Pancasila" bukan sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan kritik yang tajam (disebut negatif, tidak "membangun"), tuntutan orang kecil (yang disebut bertentangan dengan kekeluargaan), penegasan hak-hak asasi manusia (dianggap liberal), tuntutan buruh untuk mendirikan serikat buruh sendiri (disebut bersemangat komunis) dsb.

Dengan lain kata, **budaya politik Orde Baru** sudah **tidak** mempunyai tempat untuk **wacana yang jujur** dan **terarah** pada yang benar. Nilai-nilai sendiri sudah tidak dilihat, semuanya diinstrumentalisasi menjadi sarana pemantapan atau **perebutan** akses **ke kekuasaan**. Tidak lagi kelihatan apakah para elite kita masih mempunyai nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan etis yang sungguh-sungguh.

Ciri khas itu adalah **inflasi omongan** para penguasa kita tentang nilai-nilai, kepribadian dan falsah bangsa, etika, moralitas, kecenderungan-kecenderungan para penguasa untuk memberikan khotbah atau nasehat-nasehat moralis kepada bawahan dan masyarakat. Padahal umumnya dianggap mencurigakan apabila penguasa mulai membawa diri sebagai resi atau kiai.

(3) Erat hubungannya dengan defisit kedua tadi adalah defisit yang **ketiga**: mekanisme selalu mencari kambing hitam. Hal itu tercapai dengan memakai stereotip-stereotip yang sudah 30 tahun lamanya selalu diambil dari laci yang sama: itu "liberal", "pikiran asing", "komunis", "Marxis", "ekstrem kanan". Dari-pada mempertanyakan di mana letak sumber pelbagai distorsi dan kemacetan, distorsi dan kemacetan itu dilemparkan kepada bogeyman-bogeyman" itu, yaitu pihak-pihak yang dikatakan sudah tertular semangat yang buruk itu.

Lebih buruk lagi, berulang-ulang kita mengalami bahwa pelbagai kejadian negatif begitu saja dilemparkan kepada pihak-pihak yang mau dicap atau dimusuhi. Misalnya kepada LSM-LSM. Atau kepada mereka yang memperjuangkan perubahan dalam sikap sembrono terhadap lingkungan hidup. Atau pada mereka yang kritis. Atau, paling menyedihkan, pada generasi muda yang masih idealis dan karena itu (kadang-kadang secara berlebihan) kritis. Contohnya adalah waktu PRD dipersalahkan atas kerusuhan tanggal 27 Juli 1996.

(4) **Defisit-defisit** itu semua tidak lepas dari sebuah gejala yang memang sudah sering sekali dikemukakan, dan memang harus dikemukakan dan difikirkan kembali: gejala Jawa-nisasi tatakrama komunikasi nasional. Masalahnya bukan apakah bahasa dan tatakrama Jawa merupakan realitas yang bernilai budaya tinggi. Hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Masalahnya juga bukan bahwa budaya nasional, dan tatakrama pergaulan komunikasi nasional, dipengaruhi oleh keanekaan budaya Nusantara. Melainkan masalahnya adalah bahwa dalam hal ini budaya Jawa sedemikian dominan.

68 tahun yang lalu orang-orang muda Indonesia mence-tuskan Sumpah Pemuda: Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bukan nusa, bangsa dan bahasa Jawa, melainkan nusa, bangsa dan bahasa Indonesia. Dan agar hal itu menjadi terang ben-derang, maka sebagai bahasa Indonesia dipilih bahasa Me-layu, dan bukan bahasa Jawa yang memang waktu itu menjadi calon bahasa Indonesia juga, apalagi mengingat lebih dari 40 persen bangsa Indonesia berbahasa-ibu Jawa).

Tetapi sekarang bahasa Jawa meresap ke dalam bahasa Indonesia di semua tingkatan. Dan bukan hanya bahasa, di mana penghayatan per-saudara-an atau per-Bung-an sudah lama dikembalikan kepada bahasa hirarkis yang memakai "Bapak" dan "Ibu" daripada "Saudara/i" atau "Bung". Hal ini dapat dimengerti. Sikap menghormati orang berkedudukan tinggi, ya orang tua dalam segala arti, terlalu mendalam ber-

akar dalam penghayatan kebanyakan budaya Indonesia untuk dapat disingkirkan oleh idealisme demokratis generasi pence-tus Kemerdekaan. Tetapi bahkan kata-kata krama semakin di-pakai. Daripada "datang" bicara "rawuh", daripada "membe-ritahu" disebut "maringi dawuh" dst.

Seperti dalam sikap bertutur, begitu dalam bersikap ba-dan pola-pola Jawa muncul kembali. Dengan kenyataan bah-wa "orang tua" tidak dapat dibantah, bahwa di hadapan raja orang tidak boleh bicara kalau tidak disuruh, bahwa tidak per-nah boleh dikemukakan sesuatu yang memperlihatkan bahwa kita sendiri berpendapat lain daripada penguasa. Jawanisasi itu bagaikan minyak di atas gelora gelombang laut membuat segala-galanya tenang, tertahan. Bukan bahwa sikap "tahu di-ri" dan "tepa salira" sangat ditekankan adalah khas bagi buda-ya Orde Baru, melainkan bahwa sikap itu ditekankan terhadap bawahan dan bukan terhadap atasan. Padahal semestinya yang harus "tahu diri" 'kan atasan, sedangkan bawahan justru diharapkan berani mengajukan yang perlu diajukan.

Maka Jawanisasi budaya komunikasi di antara elit politik perlu dihitung sebagai defisit budaya politik negara kita yang keempat.

MEMBANGUN SEBUAH BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS

Membangun budaya politik yang beradab, dewasa dan demokratis termasuk salah satu tantangan paling penting da-

lam pembaharuan sistem politik menjelang abad ke-21. Di mana kita dapat menempatkannya ke dalam suatu pentahapan sejarah Republik Indonesia yang merdeka: Kita sekarang masih di tahap **kedua**. Yang **pertama**, di bawah Presiden R.I. pertama berhasil menanamkan kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia dalam kesatuan satu negara Republik Indonesia (meminjam peristilahan Herb Feith: ini tahap *solidarity making*). Di tahap kedua, di bawah Presiden R.I. **kedua**, kebangsaan mau diberi substansi dengan mendasarkan republik kita atas dasar perekonomian yang mantap, membangun administrasi negara yang nyata dan mengatasi perpecahan-perpecahan ideologis yang mengancam kesatuan bangsa. Akan tetapi karena sistem kekuasaan Orde Baru sejak semula direncanakan sebagai **sistem top down** yang memandang masyarakat sebagai objek perencanaan pemerintah belaka, sistem itu meniadakan segala kontrol nyata atas kekuasaan yang menghasilkan tercekiknya sistem itu karena **korupsi** yang dilakukannya sendiri. Sedangkan sekarang kita berada dalam tahap peralihan yang amat serius. Sebenarnya kita sekarang memerlukan pewujudan kehidupan Republik yang normal, yang biasa, jadi mengembangkan rutin-rutin, termasuk budaya politik yang biasa-biasa; bukan lagi meletakkan pelbagai dasar, melainkan kemampuan untuk secara rutin, institusional dan prosedural memecahkan masalah-masalah kebangsaan. "**Normalisasi**" kehidupan bangsa itu mengandaikan **demokratisasi**. Maka su-

dah jelaslah bahwa tahap ketiga itu menuntut adanya budaya politik yang beradab, dewasa dan demokratis.

Ada dua pertanyaan yang muncul. Pertama, unsur-unsur mana yang perlu dibiasakan kembali dalam "bisnis berpolitik" di negara kita ini agar terwujudlah budaya politik sebagaimana kita mengharapkannya? Dan kedua, bagaimana budaya politik seperti itu dapat diusahakan?

Berikut ini saya menyebutkan saja beberapa unsur yang menurut hemat saya harus menjadi ciri budaya politik pasca tahap kedua sejarah Republik Indonesia.

1. Keterbukaan: Keterbukaan adalah prasyarat. Artinya, kita harus belajar untuk mengemukakan kritik: dengan jelas, efektif, tidak emosional, to the point, objektif, tajam, serta untuk menerima kritik itu. Kritik itu tetap dituntut sopan dan tahu diri. Tetapi kritik itu dapat diarahkan pada seluruh eksekutif, termasuk kebijakan Presiden. Di sini termasuk bahwa menjadi biasa bahwa masyarakat dan wakil-wakilnya menuntut agar segenap kebijakan pemerintah dipertanggungjawabkan dan, ya tentu, dituntut pertanggungjawabannya.

Hal itu pertama menyangkut MPR. MPR mempertanyakan dengan sopan dan tajam semua hal yang dianggap tepat, termasuk alokasi uang, misalnya kebijakan transportasi, permobilan nasional, ke-dirgantara-an nasional, apa pun. Tak ada

hal-hal yang tidak boleh dituntut pertanggungjawabannya, dikritik.

Lalu tentu DPR. Itulah tempat "rutin" untuk mengajukan pertanyaan kritis maupun kritik langsung. Lalu tentu saja masyarakat sendiri, dan itu berarti: pers dan media komunikasi lain, juga. Jadi di situ perlu betul-betul ada perubahan.

2. Pewajaran bahasa komunikasi dalam elit politik dan terhadap elit politik. Keterikatan pada tradisi-tradisi pra-modern ("feodal") dalam penyambutan pejabat perlu dikurangi. MPR dan DPR yang hendaknya memastikannya. Misalnya di tingkat bupati. Atau "kunjungan pejabat ke daerah". Harus menjadi biasa, sesama warga. Perlu ada de-kramanisasi bahasa elit. Misalnya dengan menertawakan dan bikin ditertawakan orang yang, dalam wacana berbahasa Indonesia, merasa perlu menyelipkan kata-kata Jawa krama inggil. Barangkali sebutan "Saudara" perlu dideritualisasikan (kita ingat akan ke-lucuan apabila kata "Saudara" dipakai di SU MPR hal mana memang memperlihatkan bahwa seluruh sidang MPR di masa Orde Baru sekadar ritus dan bukan sebuah transaksi politis sebagaimana semestinya). Masalahnya bukan kata "Pak" atau "Bu", tetapi sikap merendah yang menyertainya.

3. Perlu dikembalikan budaya bertanggungjawab. Salah satu hal yang paling tidak tertahan sekarang adalah bahwa lembaga-lembaga yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 wajib

menuntut pertanggungjawaban pemerintah, tidak (berani) melakukannya, bukan hanya Golkar (= Partai Pemerintah), melainkan juga PPP dan PDI (partai-bukan pemerintah) tidak berani. Itu harus berakhir. Nasib bangsa menuntut agar mereka yang diberi mandat untuk memimpinnya dapat diminta pertanggungjawabannya.

4. Unsur **keempat**, menurut hemat saya, adalah **penegakan** kembali sesuatu yang di masa Orde Baru seakan-akan sudah tenggelam total dalam kompleks **korupsi-kolusi-nepotisme**, yaitu bahwa orang memegang jabatan umum demi kepentingan umum dan bukan demi kepentingan sendiri atau keluarganya. Di sini kita bicara tentang budaya politik, maka saya tidak masuk ke dalam masalah korupsi-kolusi-nepotisme. Tetapi dari sudut budaya politik pun keterikatan total pada kepentingan umum harus terungkap. Jadi perlu dibangun suasana yang tidak membiarkan penyalahgunaan-penyalahgunaan yang sekarang berlangsung, yang begitu mengancam masa depan bangsa.

Hal itu dapat terjadi terutama lewat DPR dan media, terutama pers. DPR dengan tajam harus, sebagai kebiasaan, jadi sehingga menjadi budaya, menyorot segenap praktek nepotisme atau yang berbau nepotisme dan kolusi ke muka umum. Dibantu oleh pers yang investigative. Korupsi dan kolusi tentu masih akan terjadi juga, tetapi hal itu kembali harus dibikin tindakan yang memalukan.

5. Unsur terakhir mestinya kepedulian sosial. 30 tahun pembangunan top down jelas juga menghasilkan perbaikan keadaan orang kecil dan berhasil secara mengesankan dalam menekan kemiskinan. Akan tetapi pola itu sekaligus meninggalkan suatu budaya pejabat dan orang gede yang tidak menganggap orang kecil dan bahkan sudah tidak sadar akan hal itu sehingga diperlihatkan tanpa malu-malu. Orang kecil di negara kita tidak terhitung. Paling-paling ia menjadi objek kebijakan pemerintah, tapi didengar tak pernah. Malah sering orang kecil menjadi kurban pembangunan.

Nah, hal itu bukan saja masalah kebijakan politik, melainkan juga masalah budaya politik. Budaya politik sekarang sudah membiasakan elit politik untuk tidak melihat lagi orang kecil. Budaya itu memang mengandaikan bahwa orang kecil itu secara nyata terwakili. Apakah itu serikat buruh, perwakilan kaum tani atau para kaki lima, tanpa perwakilan golongan-golongan orang kecil, demi dan oleh mereka sendiri, budaya kepedulian sosial (yang menembus budaya ketidakpedulian sosial yang sekarang menutupi negara kita) mengandaikan perwakilan itu.

6. Unsur yang barangkali paling menentukan dan tidak mudah: Kita harus **mengembangkan** sebuah **budaya konflik**. Lebih tepat, sebuah budaya penanganan konflik. Kehidupan demokratis hanya dapat berhasil kalau semua kekuatan demokratis tidak bersikap mutlak-mutlakan, mampu berkompromi.

promi, bersedia untuk berkoalisi dengan partner yang barangkali secara instingtual kurang disenangi. Amat penting adalah membedakan antara "lawan" dan "musuh". Perlawanan politik, kritik dan retorika keras adalah sesuatu yang biasa, tetapi tidak boleh menjadi permusuhan. Kemampuan untuk meyakini konsensus dasar demokratis yang mempersatukan pemerintah dengan oposisi adalah sangat penting.

BAGAIMANA MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS?

Lalu, bagaimana budaya seperti itu dapat diwujudkan? Suatu budaya umumnya tidak diwujudkan per dekrit. Ia berkembang mengikuti keseluruhan kebijakan, kebiasaan, keputusan yang diambil. Ia hasil sinergi sikap dan faktor yang menentukan kehidupan politik. Maka tidak ada cetak biru untuk pembentukan budaya politik yang beradab dan dewasa itu. Tetapi beberapa unsur dalam menjawab pertanyaan itu dapat disebutkan:

- Yang jelas, budaya politik demokratis hanya dapat dipelajari sambil berdemokrasi. Learning by doing! Kita harus mulai. Kiranya tekanan masyarakat untuk melepaskan sikap-sikap feodal dan budaya feodal Orde Baru juga akan kuat. Tetapi yang menentukan kiranya contoh para pimpinan, para pautan politik. Mereka harus memberikan sebuah contoh dan mereka, karena itu, harus memelopori.

- Adanya partai-partai politik sendiri akan menghidupkan arena politik, dapat membukanya, asal semua bersedia untuk menerima konsensus dasar.
- Bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya juga akan sangat penting dan berpengaruh.
- Beberapa **perubahan**, misalnya yang menyangkut kebiasaan feodalistik (dalam pola komunikasi antar elit, elit/penguasa dengan masyarakat, kunjungan ke daerah dlsb.), dapat ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan, misalnya DPR.
- Tetapi yang terpenting adalah **keterbukaan demokratis** sendiri: keterbukaan pers, keterbukaan menyatakan pendapat. Jadi defeodalisasi, de-inflasi nilai-nilai bangsa, ketakutan terhadap kritik dengan mudah dapat didobrak oleh masyarakat sendiri asal kehidupan bangsa mengalami de-sisakoptipisasi. Dengan diberikan kebebasan kepada pers, diizinkan masyarakat membentuk organisasi politik, partai politik, sendiri, ketertutupan tidak dapat dipertahankan lagi.

PENUTUP

Budaya politik demokratis yang terbuka, beradab dan dewasa itu hanya dapat terwujud dalam rangka **melaksanakan** demokrasi. Akan tetapi peran para panutan demokrasi, para pimpinan partai, pimpinan pemerintah akan sangat menentukan.

Misalnya saja, menurut hemat saya sesudah pemilihan umum 1999 perlu dibuat kabinet yang berdasarkan basis kuat, di mana tokoh-tokoh Ciganjur semua ikut. Andaikata mereka main mutlak-mutlakan -menurut cara: kalau aku bukan presiden, aku akan menjadi oposisi- bisa juga demokrasi baru kita tidak akan bertahan lama. **Kemampuan untuk berkompromi**, untuk bekerja sama dengan partai lain yang dari perasaan insting kurang disenangi, termasuk kesediaan untuk menjadi hanya nomor dua atau nomor tiga apabila hasil pemilu memang demikian, amat sangat perlu agar masyarakat dapat belajar politik. Masyarakat memang sudah lama tidak biasa dengan demokrasi. Para pimpinan harus memelopori sikap-sikap demokratis yang perlu menjadi budaya demokratis bangsa Indonesia.

■ ■ ■

*Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ, rohaniwan,
guru besar filsafat sosial di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta dan
guru besar luar biasa di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.*

